

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 7
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 13 Desember 2018
Waktu	: Pukul 08.30 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Membahas Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu
Ketua Rapat	: Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Isnu Purwanto, S.IP, MM/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 23 dari 45 Anggota Komisi II DPR RI B. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan C. Ketua KPU RI D. Ketua Bawaslu RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI dengan agenda Membahas Peraturan KPU dan Peraturan Basawlu, pada hari Kamis, 13 Desember 2018, dibuka pada pukul 08.40 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi II DPR RI pada prinsipnya menyetujui :
 - a. Rancangan Peraturan KPU Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Kecuali pada Pasal 8 terkait pindah memilih.

- b. Rancangan Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.
 - c. Rancangan Peraturan KPU tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.
 - d. Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Komisi II DPR RI pada prinsipnya menyetujui
- a. Rancangan Peraturan Bawaslu Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
 - b. Rancangan Peraturan Bawaslu Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.
 - c. Rancangan Peraturan Bawaslu Tentang Pengawasan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.
3. Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, dan Kemendagri bersepakat dapat mencabut persetujuan terhadap poin 1 dan 2 jika ada hal yang perlu dibahas kembali, termasuk melengkapi pendapat dan usulan Komisi II DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 10.30 WIB.

Jakarta, 13 Desember 2018
KETUA RAPAT

ttd

DR. IR. E. HERMAN KHAERON, M.SI
A-419